

POTENSI PENERBITAN GREEN SUKUK DAERAH DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

Suherman¹, Parista Kristina², Desi Natalia³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangka Raya

E-mail: suherman@feb.upr.ac.id

Article History

Received: 14-12-2024

Revision: 18-12-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 20-12-2024

Abstract. Sustainable development in Indonesia is essential to address environmental and social challenges. Indonesia has adopted the Sustainable Development Goals (SDGs); however, issues such as regional inequality and lack of coordination among stakeholders remain significant obstacles. Collaboration among the government, society, and the private sector is key to achieving success. Green Sukuk has emerged as an innovative financial instrument that supports environmentally friendly projects and attracts investors. In Central Kalimantan, the issuance of Green Sukuk has the potential to fund green projects, stimulate economic growth, and create job opportunities. The province is rich in natural resources and demonstrates a strong commitment to sustainable development. However, challenges such as limited public understanding and inadequate financial infrastructure must be addressed. This study employs qualitative methods with a Netnography and SWOT analysis approach. The findings highlight the need for a clear regulatory framework and public education to optimize the potential of Green Sukuk as a catalyst for sustainable development.

Keywords: Green Sukuk, Potential, Sustainable Development

Abstrak. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia penting untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial. Indonesia telah mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs), namun masih dihadapkan pada masalah ketidakmerataan regional dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan. Green Sukuk hadir sebagai instrumen keuangan inovatif yang mendukung proyek ramah lingkungan dan menarik investor. Di Kalimantan Tengah, penerbitan Green Sukuk berpotensi mendanai proyek hijau, meningkatkan ekonomi, dan membuka lapangan kerja. Provinsi ini memiliki sumber daya alam melimpah dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan infrastruktur keuangan harus diatasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Netnografi dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan perlunya regulasi yang jelas dan edukasi publik untuk mengoptimalkan potensi Green Sukuk sebagai katalis pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green Sukuk, Potensi, Pembangunan Berkelanjutan

How to Cite: Suherman, Kristina. P. & Natalia. D. (2024). Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 3119-3131. [10.54373/ifijeb.v4i6.2385](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2385)

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memungkinkan generasi masa kini memenuhi kebutuhannya tanpa harus menyerap kapabilitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi Sustainable Development Goals sebagai kerangka kerja untuk pencapaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Menurut Novita et al., (2024) pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmerataan regional, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta isu transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Penelitian oleh Farida et al., (2024) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penelitian terkait SDGs di Indonesia, masih banyak tempat yang membutuhkan perhatian lebih, seperti pengelolaan sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan pengurangan deforestasi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam implementasi SDGs agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.

Green Sukuk muncul sebagai instrumen keuangan inovatif yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Green Sukuk dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur hijau. Menurut (Abdullah, 2020), Green Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi yang ramah lingkungan di kalangan masyarakat dan investor. Suherman et al., (2019) mengemukakan bahwa dana hasil penerbitan green sukuk wajib dialokasikan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan lingkungan dalam rangka memerangi masalah perubahan iklim. Dengan adanya Green Sukuk, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penerbitan Green Sukuk di Indonesia juga sejalan dengan komitmen negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam penelitian Karina (2019) menunjukkan bahwa meskipun Green Sukuk

mendapatkan respons positif dari pasar namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman tentang instrumen ini di kalangan pemangku kepentingan dan kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat Green Sukuk serta menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan instrumen ini. Dengan demikian, Green Sukuk dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Penerbitan Green Sukuk di Kalimantan Tengah menawarkan peluang signifikan untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Menurut hasil penelitian Hamzah et al., (2022) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk daerah di Indonesia memiliki potensi yang signifikan sebagai sumber pendapatan lokal untuk pengembangan infrastruktur, terutama mengingat mayoritas populasi Indonesia adalah Muslim dan adanya penurunan dana keseimbangan dari pemerintah pusat. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan proyek-proyek hijau yang dapat dibiayai melalui Green Sukuk, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan infrastruktur hijau. Menurut Mutmainnah & Romadhon, (2023) Green Sukuk dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia, dengan memberikan akses ke sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat dan investor terhadap investasi yang bertanggung jawab secara sosial semakin meningkat, sehingga menciptakan pasar yang lebih luas untuk Green Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan Green Sukuk tidak hanya berkontribusi pada pembiayaan proyek hijau tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Namun, meskipun terdapat peluang besar, penerbitan Green Sukuk di Kalimantan Tengah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan informasi mengenai instrumen ini di kalangan pemangku kepentingan lokal. Karina (2019) mencatat bahwa tantangan lain termasuk keterbatasan dalam identifikasi aset berkelanjutan dan kesiapan perusahaan penerbit untuk memenuhi standar lingkungan yang diperlukan. Selain itu, regulasi yang masih belum sepenuhnya mendukung pengembangan Green Sukuk juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan edukasi tentang Green Sukuk serta menciptakan kerangka regulasi yang lebih jelas agar potensi penerbitan Green Sukuk dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Penerbitan Green Sukuk memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kinerja keuangan di Indonesia. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Suriadi et al., (2020) menunjukkan beberapa temuan kunci terkait penerbitan sukuk daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, yang dapat dirangkum sebagai berikut: Analisis SWOT: Kekuatan: Terdapat keinginan yang tinggi untuk mengembangkan daerah, potensi signifikan dari investor Muslim, dan jaringan perbankan yang luas. Kelemahan: Masalah terkait default obligasi, harga yang tinggi, serta kurangnya kesadaran dan promosi publik mengenai sukuk. Peluang: Dukungan regulasi untuk penerbitan sukuk, potensi pertumbuhan ekonomi, dan pasar yang besar untuk sukuk. Ancaman: Meningkatnya utang pemerintah, risiko yang terkait dengan pinjaman, dan persaingan dari obligasi pemerintah lainnya. Menurut penelitian oleh Ali et al., (2023) penerbitan Green Sukuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial, dan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Green Sukuk dapat meningkatkan investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor hijau. Menurut hasil dari penelitian Ulfah (2023) menunjukkan bahwa daerah terkhususnya di DKI Jakarta memiliki potensi yang signifikan untuk menerbitkan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan untuk proyek infrastruktur hijau serta menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat dan dukungan yang memadai, sukuk daerah dapat menjadi opsi pembiayaan yang layak untuk pembangunan berkelanjutan terutama di DKI Jakarta.

Selain itu, Green Sukuk juga menarik perhatian investor yang peduli dengan isu lingkungan, sehingga memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Dengan demikian, Green Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan tetapi juga sebagai pendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Namun, meskipun potensi positifnya, penerbitan Green Sukuk juga menghadapi tantangan yang dapat mempengaruhi dampaknya terhadap ekonomi. Suriani et al., (2024) mencatat bahwa meskipun Green Sukuk dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Green Sukuk benar-benar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah untuk memaksimalkan manfaat dari Green Sukuk, serta menghindari potensi risiko yang dapat muncul dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penerbitan Green Sukuk daerah dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Tengah, serta menganalisis dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan

dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan Green Sukuk sebagai solusi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Netnografi dan analisis SWOT. Netnografi membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap green sukuk, sedangkan analisis SWOT memberikan gambaran tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerbitan sukuk.

Obligasi Syariah (Sukuk)

Dalam beberapa tahun terakhir, obligasi syariah juga dikenal sebagai sukuk merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sukuk adalah opsi pembiayaan yang memenuhi kebutuhan investasi dan memiliki efek sosial dan lingkungan yang positif. Menurut Nurhanifah (2024) sukuk telah menjadi bagian integral dari pasar keuangan Islam, dengan potensi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk energi terbarukan dan pembangunan infrastruktur hijau, karena membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Namun, meskipun sukuk menawarkan banyak peluang, terdapat tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan adopsi dan penggunaannya. Penelitian oleh Qosim et al., (2023) mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengembangan sukuk, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan investor mengenai instrumen ini dan kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan minat terhadap sukuk hijau, masih ada hambatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas proyek yang dibiayai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan edukasi tentang sukuk serta menciptakan kerangka regulasi yang mendukung agar sukuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia.

Mekanisme Obligasi Syariah (Sukuk)

Prinsip-prinsip obligasi syariah mengharuskan transaksi bebas dari riba (bunga) dan spekulasi. Emiten, atau pihak yang menerbitkan sukuk, harus membayar imbalan kepada pemegang sukuk dalam bentuk hasil atau margin yang telah disepakati sebelumnya. Menurut

Leli (2017), mekanisme ini melibatkan berbagai akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang menentukan bagaimana keuntungan dibagi antara emiten dan investor. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua transaksi yang terkait dengan sukuk sesuai dengan hukum Islam, mulai dari penerbitan hingga pembayaran kembali dana pada saat jatuh tempo. Proses penerbitan sukuk juga melibatkan beberapa pihak penting, termasuk wali amanat yang bertindak sebagai perwakilan pemegang sukuk untuk melindungi kepentingan mereka. Dalam hal ini, wali amanat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa emiten memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penelitian oleh Amin (2020) menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan emiten sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor serta memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan bersih dari unsur non-halal. Dengan demikian, mekanisme obligasi syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan terhadap hak-hak investor.

Obligasi Daerah

Pemerintah daerah menerbitkan instrumen keuangan yang dikenal sebagai obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek publik yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur penerbitan obligasi daerah. Menurut penelitian oleh (Kaluge, 2011), Pemerintah daerah dapat menggunakan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan yang penting, terutama dalam situasi otonomi daerah, yang memberikan pemerintah lokal lebih banyak kontrol keuangan. Penerbitan obligasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dari masyarakat melalui pasar modal, yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Mekanisme penerbitan obligasi daerah melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemerintah daerah harus menyusun rencana penerbitan obligasi yang mencakup jumlah nominal, penggunaan dana, dan tanggung jawab atas pembayaran pokok dan bunga. Penelitian oleh (Studi lanskap obligasi daerah di Indonesia, n.d.) menunjukkan bahwa meskipun potensi penerbitan obligasi daerah di Indonesia cukup besar, masih terdapat tantangan dalam hal kesiapan pemerintah daerah dan pemahaman masyarakat mengenai instrumen ini. Selain itu, tidak adanya jaminan dari pemerintah pusat terhadap obligasi daerah menambah risiko yang harus diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan penerbitan obligasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan di kalangan pemangku kepentingan agar penerbitan

obligasi daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, obligasi daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian oleh Okta & Kaluge (2011) menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat dalam proses penerbitan obligasi untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, obligasi daerah dapat menjadi solusi inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal.

HASIL

Temuan penelitian menunjukkan prospektif penerbitan Sukuk Hijau di Kalimantan Tengah, yang menggambarkan bahwa provinsi ini diberkahi dengan sumber daya alam yang berlimpah dan menganut kebijakan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, sehingga meningkatkan prospek proses ijtihad untuk segera dimulai, menghadirkan peluang signifikan bagi kemajuan ekonomi hijau. Sementara konsentrasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi pada tahun 2024 merupakan manuver strategis, hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang Sukuk Hijau dan kendala infrastruktur keuangan harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara entitas pemerintah, sektor swasta, dan publik sangat penting untuk membangun ekosistem yang mendorong penerbitan Sukuk Hijau secara efektif.

DISKUSI

Gambaran Umum Infrastruktur Kalimantan Tengah

Berdasarkan informasi dari Biroadpim (2024), fokus dari Kemajuan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2024 meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara komprehensif seperti yang digambarkan di bawah ini:

- a. Program pembangunan infrastruktur telah diberikan prioritas tinggi, yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, dan pelabuhan, serta peningkatan bandara, dengan proyeksi alokasi keuangan Rp 2,1 triliun yang dialokasikan untuk periode 2022 hingga 2024.
- b. Dalam bidang pendidikan, Provinsi Kalteng berkomitmen untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia dengan memperluas bantuan sosial pendidikan kepada siswa yang patut dicontoh dan kurang beruntung secara ekonomi dari Provinsi Kalteng.

c. Mengenai kesehatan, indikator kinerja Provinsi Kalteng menunjukkan keberhasilan yang cukup besar, terutama ditandai dengan berdirinya Rumah Sakit Provinsi, yang disebut Rumah Sakit Hanau.

d. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) untuk tahun 2023 mencapai 73,73, yang diakui sebagai pencapaian terpuji karena melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Daerah (RKPD) untuk tahun 2024, sehingga mengkategorikannya dalam braket IPM tinggi. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (OUR) yang tercatat pada Februari 2024 adalah 3,67%, yang hampir selaras dengan target RKPD untuk tahun 2024, meskipun volatilitas yang melekat biasanya terkait dengan metrik OUR.

Potensi Di Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki berbagai sumber daya mineral termasuk batu bara, emas, dan bijih besi. Selain itu, lahan subur di Kalimantan Tengah mendukung pertanian dan perkebunan, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan rotan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Potensi ini tidak hanya berfokus pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup pengembangan energi terbarukan dan pariwisata alam yang kian meningkat, seperti Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan populasi orangutannya

Kalimantan Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk penerbitan green sukuk, terutama karena kekayaan sumber daya alam dan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Provinsi ini kaya akan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon, serta potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ekonomi hijau di Kalimantan Tengah dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara, yang sejalan dengan tujuan penerbitan green sukuk untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan (Susila & Hukom, 2023). Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi sektor swasta, Kalimantan Tengah dapat menjadi pusat penerbitan green sukuk yang efektif dalam mendukung proyek-proyek seperti pengelolaan hutan lestari dan energi terbarukan.

Penerbitan green sukuk di Kalimantan Tengah berpotensi memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dengan menggunakan instrumen keuangan ini, dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau, seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan pertanian berkelanjutan (Karina, 2019). Hal ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Menurut Arifudin et al., (2024) menunjukkan bahwa kesadaran akan investasi yang bertanggung jawab secara sosial semakin meningkat di kalangan investor, yang membuka peluang bagi Kalimantan Tengah untuk menarik lebih banyak investasi melalui green.

Namun, tantangan dalam penerbitan green sukuk di Kalimantan Tengah perlu diatasi agar potensi ini dapat terwujud secara maksimal. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep green sukuk dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proyek-proyek hijau (Udzma, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik mengenai manfaat dan mekanisme green sukuk. Selain itu, penguatan regulasi dan kolaborasi internasional juga penting untuk mengoptimalkan kontribusi green sukuk dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, Kalimantan Tengah dapat menjadi contoh sukses dalam penerapan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.

Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Tengah yang luas ini membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Dari laman berita Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Tengah, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki APBD baru sebesar 5,45 triliun, terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar 2,79 triliun dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 2,66 triliun. Berdasarkan perhitungan ini, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kebutuhan dana ideal setiap tahun sebesar 4 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah memerlukan sumber pendanaan yang lebih besar.

Identifikasi Pihak Yang Terlibat

Penerbitan green sukuk dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, dan hasilnya dialokasikan untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam proses penerbitan green sukuk, beberapa pihak terlibat, antara lain:

- a. Pemerintah Pusat: Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah bertanggung jawab atas penerbitan green sukuk dan pengelolaan dana yang diperoleh.
- b. Investor: Baik individu maupun institusi yang membeli green sukuk sebagai bentuk investasi.
- c. Lembaga Keuangan: Bank dan institusi keuangan lainnya yang berperan sebagai agen penjual atau underwriter dalam proses penerbitan sukuk.

- d. Proyek Pelaksana: Instansi pemerintah atau badan usaha yang melaksanakan proyek-proyek hijau yang didanai oleh green sukuk.

Swot

Berikut ini adalah hasil analisis SWOT untuk Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan Di Kalimantan Tengah:

- a. Strengths (Kekuatan)

Dari penerbitan green sukuk di Kalimantan Tengah terletak pada dukungan pemerintah yang kuat dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung inisiatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, karena ada banyak sumber daya alam dan potensi energi terbarukan, ada peluang untuk proyek yang dapat dibiayai dengan green sukuk, seperti pengelolaan hutan lestari dan pembangunan infrastruktur hijau (Wita Susila & Hukom, 2023).

- b. Weaknesses (Kelemahan)

Kurangnya pemahaman masyarakat dan investor mengenai konsep green sukuk serta keterbatasan infrastruktur keuangan yang mendukung. Meskipun green sukuk memiliki potensi besar, tantangan dalam hal regulasi dan kompleksitas struktur perjanjian dapat menghambat proses penerbitan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, ketergantungan pada dukungan pemerintah dan kurangnya kapasitas institusi keuangan juga menjadi hambatan dalam pengembangan pasar green sukuk di daerah ini (Arifudin et al., 2024).

- c. Opportunities (Peluang)

Peluang green sukuk di Kalimantan Tengah sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya permintaan untuk energi bersih dan investasi bertanggung jawab sosial. Kesadaran global terhadap perubahan iklim dan kebutuhan untuk transisi menuju ekonomi hijau membuka jalan bagi pengembangan instrumen keuangan ini.

- d. Threats (Ancaman)

Ancaman yang dihadapi yaitu seperti kekurangan kapasitas institusi keuangan dan persaingan dengan instrumen pembiayaan lainnya perlu diatasi agar potensi green sukuk dapat direalisasikan secara maksimal. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah, green sukuk dapat menjadi alat yang efektif dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan analisis SWOT ini, mengenai potensi penerbitan green sukuk di Kalimantan Tengah dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan menunjukkan bahwa meskipun terdapat kekuatan dan peluang yang signifikan, seperti dukungan pemerintah dan meningkatnya kesadaran akan investasi berkelanjutan, tantangan dan kelemahan yang ada juga perlu diatasi. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang green sukuk, serta infrastruktur keuangan yang belum memadai, dapat menghambat implementasi yang efektif. Akibatnya, untuk meningkatkan kualitas, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Kapasitas institusi keuangan, memperkuat regulasi, dan melakukan edukasi kepada masyarakat dan investor. Dengan pendekatan yang tepat, green sukuk memiliki potensi untuk menjadi instrumen kunci dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan di Kalimantan Tengah, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis potensi penerbitan green sukuk di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki komitmen untuk pembangunan berkelanjutan dan sumber daya alam yang melimpah, yang memberikan peluang signifikan untuk mengembangkan ekonomi hijau. Fokus pembangunan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian di tahun 2024 menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan potensi tersebut. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang green sukuk, keterbatasan infrastruktur keuangan, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas SDM harus diatasi agar potensi ini dapat terwujud secara maksimal. Untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penerbitan sukuk hijau, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting.

REKOMENDASI

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai konsep dan manfaat green sukuk kepada masyarakat dan investor. Selain itu, pemerintah daerah harus memperkuat regulasi dan menciptakan insentif bagi investasi berkelanjutan untuk menarik lebih banyak dana. Pengembangan infrastruktur yang mendukung proyek-proyek hijau juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, Kalimantan Tengah dapat menjadi pionir dalam penerapan green sukuk sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, sekaligus memberikan contoh bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, Q., Rusgiyanto, S., Parveen, S., Yaacob, H., & Zin, R. M. (2023). An empirical study of the effects of green Sukuk spur on economic growth, social development, and financial performance in Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 26(8), 21097–21123. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03520-6>
- Amin, R. (2020). Obligasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 237.
- Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, & Amaliah Amaliah. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Biroadpim. (2024). *Wagub Fokus Pembangunan Kalteng di Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan*. <https://biroadpim.kalteng.go.id/2024/07/wagub-fokus-pembangunan-kalteng-di-infrastruktur-pendidikan-dan-kesehatan/>
- Farida, W. M., Iqbal, A., & Iswahyudi, M. (2024). *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Mapping Sustainable Development Goals (SDGs) Research Landscape in Indonesia: A Bibliometric Analysis*. 12(July), 162–178.
- Fauziah Ulfah, I. (2023). ANALISIS POTENSI PENERBITAN SUKUK DAERAH DALAM PEMBIAYAAN GREEN INFRASTRUCTURE DI DKI JAKARTA. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i1.8511>
- Hamzah, M. M., Baga, L. M., & Saptono, I. T. (2022). CONSTRAINTS AND STRATEGIES OF ISSUING MUNICIPAL SUKUK IN INDONESIA. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31958/imara.v6i1.5658>
- Irwan Suriadi, Siti Sriningsih, & Hailuddin. (2020). Analisis Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Di Nusa Tenggara Barat (NTB). *Journal of Economics and Business*, 6(2), 28–57. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.46>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2, 259–265.
- Leli, M. (2017). TRANSAKSI OBLIGASI SYARIAH (TINJAUAN TRANSAKSI OBLIGASI MENURUT PRINSIP-PRINSIP SYARIAH). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 53. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.960>
- Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2023). Pendayagunaan Green Sukuk dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 187–200. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2021>
- Novita, A. A., Ngindana, R., Putra, E., Virgiyansha, D., & Nalendra. (2024). Development and challenges in the implementation of sustainable development goals (SDGs) in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 5(2), 189–196. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.21192>
- Nurhanifah, N. V. (2024). Understanding Sukuk Market Development: An Overview of Opportunities and Challenges. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.155>
- Okta, D., & Kaluge, D. (2011). ANALISIS PELUANG PENERBITAN OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 005(02), 157–171. <https://doi.org/10.21776/ub/JIAE/2016/005.02.7>
- Qosim, N., Ratnasari, R. T., Wardhana, A. K., Fauziana, H., & Barkah, T. T. (2023). Eight Years of Research Related to the Green Sukuk in the Global Stock Exchange Market to Support the Implementation of SDG: A Bibliometric Review. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.204>

- Setda. (2019). *Gubernur Minta Bupati dan Walikota se-Kalteng Memaksimalkan Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur*. <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/gubernur-minta-bupati-dan-walikota-se-kalteng-memaksimalkan-pembangunan-dan-perawatan-infrastruktur>
- Suherman, Noor, I., & Manzilati, A. (2019). Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 37–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i6.4177>
- Suriani, S., Masbar, R., Agustina, M., & Khairul, A. D. (2024). Do Global Green Sukuk affect on Climate Change? Evidence in Issuing Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(1), 98–107. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14987>
- Udzma, L. A. (2024). *Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāṣid Al-Syari'Ah*. 5. <https://repository.uinsaizu.ac.id/26497/>
- Wita Susila, & Alexandra Hukom. (2023). Potensi Implementasi Green Economy Di Kalimantan Tengah. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 239–248. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.908>